



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu bank dalam industri perbankan perlu melakukan perhitungan pada keuangan dari operasional yang dijalankan setiap harinya, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi performa bank (*bank's performance*) serta mengidentifikasi keunggulan (*strength*) dan kelemahannya (*weakness*). Metode penilaian kesehatan bank dikenal dengan istilah CAMEL Model, yang merupakan singkatan dari *Capital adequacy*, *Asset quality*, *Management efficiency*, *Earnings*, dan *Liquidity* (Bawaneh & Dahiyat, 2019), penilaian ini juga dikenal sebagai *bank ranking system*. Penilaian ini menilai peringkat bank secara keseluruhan dari operasional, laporan keuangan, dan rasio keuangan yang digunakan, di mana kinerja bank dinilai dengan menggunakan indikator penilaian dan peringkat pada masing-masing indikator. Penulis menggunakan 5 (lima) dari 6 (enam) indikator CAMEL dalam penelitian ini untuk menilai tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di mana indikator *sensitivity* tidak diikutsertakan dalam menilai kesehatan perusahaan karena tingkat sensitivitas risiko pada BPR belum terpengaruh secara signifikan oleh risiko pasar (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, 1997).

Industri perbankan dianggap sebagai industri yang memerlukan perhatian lebih pada pengelolaan keuangan karena mudah terpengaruh oleh faktor eksternal perbankan, kehati-hatian pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, kinerja operasional, dan kepentingan *stakeholders* pada bank (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2015). Perusahaan yang bergerak dalam industri di

Indonesia mendapatkan sumber pendanaan dari bank. Dalam hal ini bank membantu meminjamkan sejumlah modal bagi perusahaan dalam pengadaan modal kerja dan kegiatan investasi. Menurut Chandani *et.al* (2014), pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia merupakan salah satu dampak dari pertumbuhan industri Perbankan, di mana berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi suatu negara dengan memberi pinjaman untuk berbagai industri dalam bentuk kredit. Bank berkontribusi langsung dalam peningkatan pendapatan di suatu negara, di mana semakin baik bank dalam mengelola sistem dan menjalankan fungsi dasarnya, maka semakin besar kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak bagi pendapatan suatu negara (Dash & Das, 2009).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perihal perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana/kreditur (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana/debitur (*deficit spending unit*), hal ini bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi di suatu negara yang efektif (Rostami, 2015). Bank dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu usaha Bank umum, BPR, dan bank dengan prinsip Syariah (Undang-undang Republik Indonesia, 1998). Bank umum merupakan badan usaha berbentuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau bisa dalam bentuk Bank Umum dengan prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (seperti ATM), sedangkan BPR tidak memberikan jasa lalu

lintas pembayaran, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan terbatas pada penghimpunan dana simpanan dan penyaluran kredit saja. Bank yang menjalankan kegiatan dengan prinsip Syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, akan tetapi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi perbedaan dengan perbankan pada umumnya terletak pada basis operasionalnya, di mana bank dengan asas Syariah berpegang pada prinsip bagi hasil (*Nisbah*) yang harus disepakati oleh pihak nasabah dan bank. (Peraturan Bank Indonesia, 1998)

Bank menghimpun dana simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito dengan memberikan suku bunga yang dibayarkan pada nasabah/kreditur yang menabung (*funding product*). Apabila dilihat dari bentuk simpanan dana yang dihimpun, terdapat perbedaan antara Bank umum dan BPR, dalam Bank umum menghimpun simpanan dalam bentuk tabungan, giro, dan sertifikat deposito, sedangkan BPR tidak dapat melakukan transaksi giral dan hanya dapat menerima dalam bentuk tabungan dan deposito saja (Cermati, 2015). Berbeda pula dengan jenis simpanan pada bank yang berprinsip Syariah, di mana simpanan yang diberikan kepada nasabah terdapat 2 (dua) jenis akad, yaitu *Mudharabah* dan *Wadiah*, perbedaan antara keduanya terletak pada jenis akad yang dapat dipilih oleh nasabah. Bagi akad *Mudharabah* mirip seperti deposito pada bank konvensional dengan prinsip bagi hasil (*profit/loss sharing*), apabila terjadi kerugian akibat kesalahan bank, maka pihak bank yang akan menanggung kerugian tersebut, sedangkan apabila bukan kesalahan bank, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan akad *Wadiah* mirip seperti tabungan pada bank konvensional

dengan prinsip titipan murni simpanan dari nasabah ke bank, sehingga simpanan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu (Cermati, 2017).

Selain menghimpun dana dari masyarakat, bank juga menyalurkan dana dalam bentuk kredit yang diberikan pada debitur (*lending product*). Jika dilihat dari cara bank memberikan pinjaman atau kredit, terdapat perbedaan antara Bank umum dan BPR, dalam BPR kredit yang disediakan terbatas pada kredit tanpa agunan dan kredit usaha kecil karena BPR sendiri memang ditujukan untuk penyaluran dana bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sedangkan Bank umum memiliki jangkauan yang lebih luas pada pemberian kredit, hal ini dikarenakan plafon kredit pada Bank umum yang tidak terbatas hingga miliaran rupiah. Pada tahun 2017, OJK menerbitkan surat edaran Nomor 41/SEOJK.03/2017 mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK) pada BPR, di mana perhitungan ini dihitung dengan melihat kecukupan modal BPR, umumnya BPR memberikan kredit sebesar 30% dari modal. Perbedaan yang paling mencolok antara kedua bank tersebut pada fasilitas kartu kredit karena unit usaha BPR tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran (Peraturan Bank Indonesia, 1998). Bank Umum Syariah (BUS) dan BPR Syariah (BPRS) yang menjalankan kegiatan dengan prinsip Syariah menjalankan kegiatan penyaluran dana dengan akad pada pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) penyertaan modal (*Musharakah*), jual beli dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), akad jual beli (*Istishna*), dan akad sewa (*Ijarah*) (Peraturan Bank Indonesia, 1998).

Berdasarkan data dari OJK mengenai jumlah simpanan dan pinjaman pada bank, penulis mendapatkan data Bank umum, BUS, BPR, dan BPRS selama periode 2015-2019. Penulis mengambil jumlah simpanan dari *total deposits*/dana pihak ketiga,

sedangkan jumlah kredit diambil dari *total loans*/total pinjaman dari masing-masing bank. Data tersebut disajikan ke dalam bentuk Tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Simpanan dan Kredit pada Bank (dalam miliar rupiah)

Tahun	Bank Umum		Bank Umum Syariah		Bank Perkreditan Rakyat		BPR Syariah	
	Simpanan	Kredit	Simpanan	Kredit	Simpanan	Kredit	Simpanan	Kredit
2015	4.238.349	3.903.936	18.112	17.495	81.908	74.807	6.456	7.367
2016	4.630.352	4.199.713	12.101	11.396	90.997	81.684	7.678	8.689
2017	5.050.984	4.548.155	12.987	11.237	100.632	89.482	9.046	10.289
2018	5.372.841	5.092.584	11.217	10.206	108.627	98.220	10.538	11.766
2019	5.709.670	5.391.846	12.405	11.406	115.912	108.784	11.535	12.807

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Pada Tabel 1.1 di atas, terdapat jumlah simpanan dan kredit yang tersebar pada 4 jenis bank yang berbeda, antara lain Bank umum, Bank umum Syariah, BPR, dan BPR Syariah, dari total simpanan dan kredit tahun 2019 terbesar terdapat pada Bank umum sebanyak 97,6%, diikuti oleh BPR sebesar 2,0%, serta Bank umum Syariah dan BPR Syariah masing-masing sebesar 0,2%. Peningkatan rata-rata simpanan pada Bank umum sebesar 8% per tahunnya, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat masih memberi kepercayaan yang tinggi terhadap sistem perbankan, ditambah layanan dan fasilitas yang diberikan oleh Bank umum lebih variatif dibandingkan BPR atau bank dengan prinsip Syariah. Pada tahun 2019, Bank umum mengalami pertumbuhan tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir, jumlah simpanan meningkat dari tahun 2018 sebesar Rp. 5.372.841

menjadi Rp. 5.709.670 miliar di tahun 2019 dan jumlah kredit meningkat dari tahun 2018 Rp. 5.092.584 miliar menjadi Rp. 5.391.846 miliar di tahun 2019.

Menurut data BPR pada Tabel 1.1 di atas, persentase pertumbuhan simpanan BPR selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar 11%, 11%, 8%, dan 7% untuk masing-masing tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sedangkan tingkat pertumbuhan kredit pada BPR berkebalikan dengan tingkat pertumbuhan pada simpanan, di mana kredit pada BPR mengalami kenaikan dengan tingkat pertumbuhan secara berurutan sebesar 9%, 10%, 11%, dan 11% untuk masing-masing tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Hal ini disebabkan oleh tingkat suku bunga yang mengalami penurunan, seperti terjadi pada tahun 2019 suku bunga tersebut turun dari 9% menjadi 8,75%. Akibat penurunan suku bunga ini, masyarakat cenderung untuk melakukan pinjaman karena tingkat suku bunga pengembaliannya rendah. Dari naik turunnya tingkat suku bunga di Indonesia, penetapan suku bunga BPR lebih tinggi 2,5% daripada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank umum (Lembaga Penjamin Simpanan, 2019), hal ini bertujuan untuk mempertahankan nasabah pada suatu BPR. Selain itu pangsa pasar yang dituju oleh BPR berbeda dengan Bank umum, di mana BPR bertujuan untuk membantu simpanan dan kredit bagi masyarakat dengan ekonomi yang rendah dan UMKM (Bisnis, 2020).

Pada Tabel 1.1 di atas, Bank umum Syariah (BUS) mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2016, tercatat pada data OJK jumlah simpanannya turun sebesar 33% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 18.112 miliar menjadi 12.101 miliar pada tahun 2016. Penurunan ini juga terjadi pada jumlah kredit pada BUS yang mengalami penurunan sebesar 35% dari tahun 2015 Rp. 17.495 miliar menjadi Rp. 11.396 miliar pada tahun 2016 (Tempo, 2016). Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E.

Siregar, dalam wawancaranya dengan Tempo, penurunan performa pada Bank umum Syariah disebabkan oleh faktor makroekonomi yang masih melambat di tahun tersebut dan penyaluran pembiayaan korporasi ke sektor komoditas yang menyebabkan *non performing financing* Bank Syariah membengkak. Hal yang sama terjadi pada unit usaha BPR Syariah yang mengalami penurunan performa selama 5 (lima) tahun, di mana jumlah simpanan pada BPR Syariah lebih kecil daripada jumlah kredit yang diberikan, hal ini disebut juga sebagai *negative spread*. Dalam menangani gejolak yang terjadi pada unit usaha Syariah, OJK gencar untuk melakukan efisiensi dan perubahan fokus bisnis untuk mengoptimalkan fungsi unit usaha Syariah.

Menurut data dari OJK, terdapat 1.545 jumlah Bank Perkreditan Rakyat di tahun 2019 yang terbagi menurut wilayah berdasarkan provinsinya seperti Tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia Tahun 2019

Wilayah di Indonesia	Jumlah BPR
Jawa	920
Sumatera	296
Bali	133
Sulawesi	70
Kalimantan	68
Nusa Tenggara	41
Papua	12
Maluku	5
Total	1.545

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, unit usaha Bank Perkreditan Rakyat tersebar menurut wilayah di Indonesia, terdapat 8 wilayah yaitu Jawa sebanyak 920 unit, Sumatera sebanyak 296 unit, Bali sebanyak 133 unit, dan wilayah lainnya kurang dari 75 unit (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Unit usaha BPR terbesar berada di wilayah Jawa, di mana kemajuan ekonomi Indonesia masih terpusat di pulau Jawa, sehingga jumlah unit usaha di luar pulau Jawa masih dikategorikan sedikit. Dalam memperluas jangkauan unit usaha BPR di luar Jawa, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan baru pada POJK nomor 12/POJK.03/2016 mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti, setiap BPR harus memenuhi syarat minimal penyertaan modal yang disetorkan ke dalam unit usaha tersebut.

Usaha BPR menyediakan jasa dan produk bagi masyarakat bergolongan ekonomi rendah serta industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di mana hal ini untuk mewujudkan industri yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat (Laksito, H & Sutapa, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 perihal UMKM, usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan/cabang perusahaan lainnya, dan usaha menengah sama dengan usaha kecil akan tetapi harus memiliki jumlah kekayaan bersih yang diatur dalam UU. Di tahun 2018, sektor UMKM menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia, di mana unit usaha ini selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hal ini dijabarkan ke dalam bentuk Tabel seperti di bawah ini:

Tabel 1.3 Peningkatan UMKM di Indonesia

Tahun \ Unit Usaha	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
2014	57.189.393	654.222	52.106
2015	58.521.987	681.522	59.263
2016	60.863.578	731.047	56.551
2017	62.106.900	757.090	58.627
2018	63.350.222	783.132	60.702

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2018

Pada Tabel 1.3 di atas menggambarkan jumlah unit usaha pada UMKM di Indonesia yang terbagi dalam usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada unit menengah terjadi penurunan di tahun 2016 karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan global (Kemenperin, 2016), sedangkan usaha mikro dan kecil mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga di tahun 2018 unit usaha mikro menjadi 63.350.222 unit dan usaha kecil menjadi 783.132, hal ini disebabkan oleh peningkatan pada sektor barang konsumen. Menurut Muhammad Ikhsan, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, menyatakan bahwa UMKM sendiri menyumbang 60,34% dari PDB tahun 2018 di Indonesia dengan nilai sebesar Rp. 8.400 triliun (okefinance, 2019). Hal ini menjadi sebuah peluang bagi BPR dalam memberikan layanan pada pinjaman/kredit bagi unit usaha pada UMKM. Di lain pihak agunan kredit yang diberikan oleh BPR lebih longgar daripada agunan pada Bank umum, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM. Walaupun agunan BPR lebih longgar, akan tetapi BPR mencari bentuk agunan tambahan lainnya yang dapat digunakan untuk alternatif jaminan pada layanan kredit, seperti agunan dalam bentuk *feasibility study*.

Mengingat pemberian kredit yang diberikan oleh BPR dengan agunan yang lebih longgar, maka BPR perlu penerapan tata kelola pada sistem manajemen yang lebih baik. Pada tahun 2019, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menutup sebanyak 60 BPR dari 1.605 unit, hal ini disebabkan bukan karena persaingan yang terjadi antara BPR di suatu wilayah, akan tetapi akibat kesalahan pada tata kelola manajemen yang dilakukan direksi pada BPR tersebut (Lembaga Penjamin Simpanan, 2019). Direktur Grup Pengelolaan Transformasi LPS, Suwandi, dalam wawancaranya dengan Antara, BPR yang bangkrut merupakan kesalahan pengelolaan direksi di perbankan, sebagai contoh semua aset BPR yang ditutup hanya sebesar Rp. 598 miliar, sedangkan jumlah simpanan nasabah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 1,6 triliun (Antara, 2018). Hal ini tidak terlepas dari kendala dan tantangan yang dihadapi BPR dalam memberikan pelayanan kredit, sebagaimana berikut (Widyastuti & Yuliandari, 2016):

1. Pendanaan pada permodalan BPR yang belum kuat
2. Inefisiensi operasional BPR, seperti sumber daya yang belum memadai
3. Belum ada sarana pendukung industri BPR (penyangga likuiditas)

Dalam menjalankan operasional diperlukan penerapan tata kelola pada sistem manajemen dalam BPR, apabila pelayanan atau peningkatan jumlah volume usaha semakin meluas maka risiko yang memungkinkan terjadi pada suatu BPR semakin meningkat. Pengelolaan ini bertujuan juga untuk meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, kinerja operasional, dan kepentingan *stakeholders* pada BPR (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2015). Apabila suatu BPR tidak mampu mengelola dengan baik, maka mengakibatkan pada kegagalan dalam pengelolaan keuangan suatu BPR, hal ini disebut dengan *financial distress*. Menurut Platt & Platt (2002), *financial distress*

merupakan kegagalan bank dalam mengelola keuangan sehingga bank tidak mampu menjalankan fungsi *intermediary*-nya, hal ini mengakibatkan suatu bank dilikuidasi/bangkrut. Menurut Viriya (2018), efek dari krisis perbankan dapat dikatakan seperti bola salju, karena berdampak pada perusahaan yang berhubungan dengan bank tersebut. Sehingga pengelolaan pada BPR dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini wajib dilakukan oleh direksi pada BPR dengan menilai dan mengambil langkah dengan benar. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan untuk melakukannya secara berkala agar dapat melihat kinerja BPR dilakukan secara baik atau tidak (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Sementara LPS menutup sebanyak 60 BPR, di tahun yang sama terdapat pula 498 BPR yang justru menunjukkan performanya dengan sangat baik, hal ini menunjukkan adanya pengelolaan CAMEL yang baik. BPR tersebut merupakan BPR yang peringkatnya meningkat dan terdapat BPR yang mempertahankan posisinya di kategori sehat. Penulis mengambil contoh BPR yang memiliki pengelolaan CAMEL yang baik dan peningkatan labanya menurut kategori aset, antara lain:

Tabel 1.4 Peningkatan Performa BPR yang Dikategorikan Sehat

Nama BPR	Kategori Aset (Rp)	Laba (Rp)
BPR Bank Bapas 69 Magelang	Di atas 1 Triliun	28,88 Miliar
BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara	Di atas 1 Triliun	82,47 Miliar
BPR Dana Nusantara Batam	Di atas 1 Triliun	42,74 Miliar
BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung	Di atas 1 Triliun	53,19 Miliar
BPR Eka Bumi Artha Metro	Di atas 1 Triliun	226,36 Miliar
BPR Kerta Raharja Tangerang	500 Miliar-1 Triliun	21,07 Miliar
BPR Supra Artapersada Sukabumi	500 Miliar-1 Triliun	17,31 Miliar
BPR BKK Purwodadi Grobogan	500 Miliar-1 Triliun	24,09 Miliar
BPR Gunung Slamet Cilacap	500 Miliar-1 Triliun	19,36 Miliar
BPR Intidana Sukses Makmur Jakarta Barat	500 Miliar-1 Triliun	12,56 Miliar
BPR Bank Daerah Gunung Kidul	250 Miliar-500 Miliar	7,95 Miliar
BPR Lingga Sejahtera Kotawaringin Barat	250 Miliar-500 Miliar	23,06 Miliar
BPR Bank Boyolali	250 Miliar-500 Miliar	8,86 Miliar
BPR Bank Jepara Artha	250 Miliar-500 Miliar	7,87 Miliar
BPR Serang	250 Miliar-500 Miliar	14,58 Miliar
BPR Parasahabat Bekasi	100 Miliar-250 Miliar	15,71 Miliar
BPR Mekar Nugraha Klepu	100 Miliar-250 Miliar	6,68 Miliar
BPR Dana Mandiri Bogor	100 Miliar-250 Miliar	16,34 Miliar
BPR Suryajaya Kubutambahan Buleleng	100 Miliar-250 Miliar	9,92 Miliar
BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan	100 Miliar-250 Miliar	3,52 Miliar
BPR Artha Swadiri Pasuruan	50 Miliar-100 Miliar	3,18 Miliar
BPR Agrimakmur Lestari Mamuju Utara	50 Miliar-100 Miliar	4,38 Miliar
BPR Trikarya Waranugraha Malang	50 Miliar-100 Miliar	4,58 Miliar
BPR Profidana Paramitra Bantul	50 Miliar-100 Miliar	2,05 Miliar
BPR Ragasakti Tangerang	50 Miliar-100 Miliar	3,26 Miliar
BPR Pelangi Kotawaringin Barat	25 Miliar-50 Miliar	3,39 Miliar
BPR Tara Dharma Artha Lampung Tengah	25 Miliar-50 Miliar	1,39 Miliar
BPR Nusantara Bona Pasogit 6 Simalungun	25 Miliar-50 Miliar	1,38 Miliar
BPR Ukabima Grazia Palembang	25 Miliar-50 Miliar	2,09 Miliar
BPR Semarang Margatama Gunadana	25 Miliar-50 Miliar	1,43 Miliar

Sumber: Infobank, 2018

Dari Tabel 1.4 di atas, terlihat BPR yang memiliki pengelolaan CAMEL yang baik memiliki peningkatan laba, baik yang memiliki aset mulai dari Rp. 25 Miliar hingga di atas Rp. 1 Triliun. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan BPR yang dikategorikan sehat karena ingin melihat bagaimana CAMEL mampu memengaruhi *bank's performance*. Sebaliknya dari hasil penelitian ini, BPR yang performanya kurang baik belum mengaplikasikan pengelolaan CAMEL dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Bank Perkreditan Rakyat merupakan unit usaha yang menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediari keuangan (*financial intermediary*) dengan menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman/kredit. Akan tetapi sering kali fungsi intermediari tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan kredit macet yang berakibat pada kebangkrutan pada suatu BPR, hal ini disebut dengan *financial distress*. Dalam beroperasi, ada 2 (dua) kemungkinan hasil dari fungsi yang dijalankan oleh BPR, kemungkinan pertama suatu BPR dapat memperoleh keuntungan dari aktivitasnya dan dikategorikan sehat (*perform*) atau kemungkinan kedua adalah terjadinya *financial distress* yang disebabkan karena pengelolaan keuangan yang salah (*failure*). Oleh karena itu, penelitian ini ingin menganalisa dari tingkat kesehatan bank yang diukur dengan CAMEL *model* untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pada BPR untuk melihat *bank's performance*. Penulis ingin meneliti pada BPR yang dikategorikan sehat karena BPR yang mampu menjaga nilai CAMELnya dengan baik akan meningkatkan performanya, sehingga dapat dilihat bagaimana BPR dapat dikategorikan sehat dan bagaimana mempertahankan performa tersebut. Permasalahan ini dijabarkan untuk diteliti lebih lanjut dan dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Capital adequacy* berpengaruh terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
2. Apakah *Asset quality* berpengaruh terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
3. Apakah *Management efficiency* berpengaruh terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
4. Apakah *Earnings* berpengaruh terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?
5. Apakah *Liquidity* berpengaruh terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada sub bab 1.1 di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pengaruh *Capital adequacy* terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2. Memahami pengaruh *Asset quality* terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Memahami pengaruh *Management efficiency* terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
4. Memahami pengaruh *Earnings* terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
5. Memahami pengaruh *Liquidity* terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang terkait secara langsung dalam penelitian ini dan pihak yang membacanya:

1. Akademi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dari pengaruh CAMEL Model Terhadap *Bank's Performance* pada Bank Perkreditan Rakyat, dan penelitian ini dapat menjadi sumber/referensi bagi penulis dengan topik yang serupa, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan untuk penulis selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.

2. Debitur/Kreditur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran dan fungsi BPR di Indonesia, serta cara penilaian kesehatan BPR yang dihitung menggunakan CAMEL Model. Sehingga pihak yang ingin mengajukan simpanan/pinjaman pada suatu BPR mampu menilai terlebih dahulu cara kerja dan performa dari suatu BPR. Hal ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai cara kerja BPR beroperasi, keunggulan/kelemahannya, dan untuk menghindari risiko kerugian akibat kesalahan pengelolaan BPR.

3. Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga keuangan, khususnya BPR untuk semakin memahami dan dapat melihat kebutuhan masyarakat untuk produk keuangan yang dibutuhkan. Sehingga BPR diharapkan

dapat melihat faktor yang berdampak pada kinerjanya dan terus melakukan inovasi dan menciptakan produk layanan yang lebih terjangkau.

4. Lembaga Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, mengurangi ketimpangan pada pertumbuhan ekonomi, dan mampu meningkatkan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sehingga pemerintah mampu meningkatkan pendapatan per kapita yang semakin meningkat kedepannya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan CAMEL model yang menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai alat untuk mengukur tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar pada data Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penelitian ini dilakukan pada 498 Bank Perkreditan Rakyat yang dikategorikan sehat pada tahun 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis membahas latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penelitian.

Bab II: Telaah Literatur

Pada bab ini penulis membahas teori yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

Teori *CAMEL Model*, teori Bank Perkreditan Rakyat dan teori mengenai variabel yang digunakan. Selain membahas pengertian, bab ini juga menyertakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya beserta hasil yang didapat, model penelitian, dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis membahas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian yang digunakan, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini penulis membahas mengenai pengolahan dan hasil analisis data yang diusulkan oleh penulis, dan menjelaskan bahasan yang tertera pada tujuan penelitian.

Bab V: Penutup

Pada bab ini, penulis membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta saran bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa maupun pihak yang terkait dari penelitian ini.

Daftar Pustaka

Bagian ini berisi judul buku maupun artikel yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini.

Lampiran

Bagian ini berisi bukti data yang digunakan dan hasil data yang diolah dalam membahas Bab IV.